

LAPORAN NOTULA

Diskusi Kelompok Terarah “Keterbukaan Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia: *Status Quo* dan Solusi”

Kamis, 19 Mei 2022 — Pukul 14.00 – 15.30

PENDAHULUAN

Ketersediaan data mengenai pemilu di Indonesia pada kondisi saat ini masih belum tersentralisasi dan masih terpecah di berbagai macam *platform*. Contohnya, untuk data mengenai pendaftaran, penelitian, administrasi, dan verifikasi partai politik, dapat ditemukan di website SIPOL. Sedangkan data mengenai informasi data pemilih terdapat di website SIDALIH dan informasi mengenai pencalonan berada di website yang berbeda lagi yaitu: SILON. Terpecahnya data pemilu di Indonesia membuat masyarakat sulit untuk memperoleh informasi-informasi penting terkait pemilu di Indonesia. Komisi Pemilihan Umum (KPU) selaku lembaga publik yang bertanggungjawab atas pengelolaan pemilu telah berinisiatif untuk memperluas penyediaan data pemilu melalui *website Open Data* KPU. Namun, masih banyak data-data penting seperti profil calon legislatif dan kerangka hukum pemilu yang belum tersedia di *website* tersebut.

Dalam rangka kegiatan *Open Government Week*, yang merupakan agenda tahunan dari Open Government Partnership (OGP) dimana seluruh negara anggota OGP secara serentak menyelenggarakan agenda yang berkaitan dengan keterbukaan pemerintah dengan tujuan untuk membuka ruang diskusi publik dan meningkatkan partisipasi masyarakat. Sekretariat Open Government Indonesia mengadakan webinar dengan tema “Keterbukaan Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia: *Status Quo* dan Solusi”. Webinar ini mengundang narasumber dari Lembaga Pemerintah dan OMS yang bergerak di lingkup pemilu.

TUJUAN

Webinar ini merupakan salah satu rangkaian dari *Open Government Week* di Indonesia yang bertujuan untuk:

1. Menyediakan ruang dialog yang mempertemukan gagasan, pengetahuan, dan pengalaman terkait upaya penyelenggaraan Pemilu secara transparan melalui keterbukaan data
2. Menambah pemahaman publik terkait kondisi keterbukaan data Pemilu di Indonesia

PEMBAHASAN

- **Ibu Maharani Putri S. Wibowo** sebagai POC OGP Indonesia menyampaikan paparan sebagai berikut:
 - a. Dalam dinamiknya semenjak reformasi, Indonesia telah menyelenggarakan Pemilu langsung sebanyak empat kali, yakni pada 2004, 2009, 2014, dan 2019. Selama empat Pemilu itu, jumlah pemilih meningkat secara berangsur
 - b. Terkait dengan kondisi demokrasi di Indonesia, terdapat 3 indikator yang harus diperhatikan, yakni 1) Kultur Politik, 2) Kebebasan Sipil, dan 3) Partisipasi Politik. Dalam indikator kultur politik, Indonesia mengalami penurunan sebesar -1,25 poin. Hal ini juga serupa diikuti oleh indikator kebebasan sipil yang stagnan selama 3 tahun terakhir serta partisipasi politik juga menurun
 - c. Dalam hal kondisi penyelenggaraan Pemilu di Indonesia, Indeks *Free and Fair Elections* terus mengalami penurunan hingga saat ini sejak 2014. Tak hanya itu, Indeks Partisipasi Politik Indonesia juga senantiasa mengalami penurunan selama 10 tahun terakhir
 - d. Pemerintah Indonesia berkomitmen atas penyelenggaraan Pemilu terbuka melalui OGI dengan melibatkan KPU RI sebagai K/L Penanggung Jawab dan Perludem sebagai OMS Penanggung Jawab, sebagaimana yang dituangkan dalam Komitmen 13 RAN OGI VI 2020-2022
 - e. Menimbang beberapa hal di atas, maka Portal *Open Data* KPU harus dimaksimalkan untuk mendorong keterbukaan data pada sektor Pemilu serta mendorong inovasi penggunaan teknologi
- **Ibu Betty Epsilon Idroos** sebagai Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia menyampaikan paparan sebagai berikut:
 - a. Terdapat beberapa dasar hukum penting yang harus diperhatikan terkait dengan keterbukaan informasi pemilu, yakni UU Keterbukaan Informasi Publik, UU Pelayanan Publik, UU Kearsipan, UU Pemilihan Umum, Perpres Pemerintahan
 - b. Roadmap Transparansi Informasi KPU terdiri dari 1) Penerapan peraturan hukum tentang Keterbukaan Informasi Publik, 2) Digitalisasi Data Pemilu, dan 3) Implementasi *Open Data*

- c. Pada prinsipnya, digitalisasi data Pemilu merupakan proses pengubahan berkas hasil Pemilu menjadi data digital dengan menerapkan prinsip data terbuka dalam rilis data. Lebih lanjut, data ini tersedia dalam format terbuka yang mudah dibagi, dipakai, dan dibaca oleh sistem elektronik
- **Ibu Titi Anggraini** sebagai Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menyampaikan paparan sebagai berikut:
 - a. Pengaturan Konstitusionalitas Pemilu dalam Konstitusi Indonesia diatur melalui Pasal 1 Ayat (2) UUD NRI 1945, Pasal 22E Ayat (1) UUD NRI 1945, dan Pasal 22E Ayat (5) UUD NRI 1945
 - b. Terdapat beberapa tantangan besar terkait penyelenggaraan Pemilu di Indonesia ke depan, antara lain: 1) membuat pemilu lebih sederhana, mudah, dan bermakna; 2) memastikan pemilih mendapatkan informasi yang benar terkait tata cara pemilihan dan profil peserta pemilu; 3) membuat pemilih paham dan bisa memberikan suara sesuai ketentuan suara yang sah; 4) pemilih tidak menjadi korban penyesatan informasi; 5) menghitung suara sesuai apa yang menjadi kehendak pemilih.
 - c. Penguatan tata Kelola dan ekosistem keterbukaan data pemilu sangat penting, mengingat hal tersebut juga berkaitan erat dengan salah satu Komitmen dalam RAN Keterbukaan Pemerintah Indonesia 2020-2022. Dalam mewujudkan hal tersebut, Perludem dengan KPU RI telah menyepakati Nota Kesepahaman tentang Penguatan Ekosistem Keterbukaan Data Pemilu.
- **Bapak Arfianto Purbolaksono** sebagai Manajer Riset dan Program The Indonesian Institute menyampaikan paparan sebagai berikut:
 - a. International Institute for Democracy and Electoral Assistance (International IDEA) mendefinisikan manajemen risiko dalam pemilu sebagai upaya sistematis yang dilakukan untuk mengembangkan pengetahuan tentang dan kesadaran situasional akan risiko internal maupun eksternal terhadap proses pemilu, untuk memulai tindakan pencegahan dan mitigasi yang tepat waktu;
 - b. Terdapat faktor risiko internal dan faktor risiko eksternal yang patut diperhatikan. Faktor risiko internal antara lain mencakup kerangka hukum Pemilu, Perencanaan Pemilu yang buruk, dan penyelesaian sengketa

Pemilu yang tidak memadai. Adapun untuk faktor risiko eksternal antara lain menyangkut kondisi social-ekonomi, pengecualian sosial dan politik, dan dinamika perubahan kekuasaan;

- c. Terdapat beberapa temuan analisis penting terkait dengan ekosistem *civic tech* data Pemilu terbuka, antara lain menyangkut aspek kepemimpinan dan komitmen politik, aspek institusional pemerintah, aspek dukungan anggaran, aspek permintaan data publik, dan aspek infrastruktur teknologi.

KESIMPULAN


Terdapat beberapa kesimpulan penting yang dapat diambil dari webinar hari ini, antara lain:

1. Membuka data-data pemilu yang belum tersedia secara bertahap oleh KPU serta dipusatkan ke dalam satu portal serta diintegrasikan dengan data lainnya;
2. Menerapkan prinsip-prinsip data terbuka pada data-data Pemilu utama yang sudah tersedia
3. Menciptakan ekosistem keterbukaan data dengan melibatkan publik

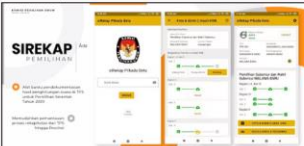
DOKUMENTASI

The screenshot shows a Zoom meeting interface with a presentation slide. The slide title is "Penguatan Ekosistem Keterbukaan Data Pemilu untuk Meningkatkan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemilu". It is divided into two main sections: "Portal Pusat Informasi Penyelenggaraan Pemilu" and "Terselenggaranya Rekapitulasi Elektronik".

Portal Pusat Informasi Penyelenggaraan Pemilu

- 1 Aksi: KPU telah membuat portal informasi terintegrasi tentang penyelenggaraan Pemilu melalui opendata.kpu.go.id

- 2 Ko-kreasi: KPU telah menerima audiensi dari Perludem mengenai peningkatan platform
- 3 Tindak lanjut: Ada beberapa data yang masih dapat diintegrasikan dalam website Open Data KPU (contoh: Kerangka Hukum Pemilu, Profil Caleg, Proses Pendaftaran Pemilu)

Terselenggaranya Rekapitulasi Elektronik


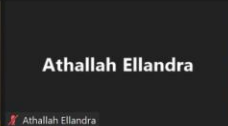
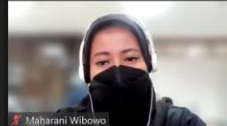






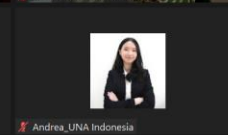










- 1 Aksi: KPU telah membuat Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap), yaitu sistem yang digunakan untuk memberikan hasil rekapitulasi suara

- 2 Ko-kreasi: KPU telah menerima audiensi dari Perludem mengenai peningkatan rekapitulasi elektronik
- 3 Tindak lanjut: Penguatan dasar hukum SIREKAP dan peningkatan kapasitas perangkat SIREKAP

The slide is numbered 11 in the bottom right corner. The Zoom interface shows participants at the top: Maharani Wibowo, Athallah Ellandra, Tri Anggraini, Andrieta OGI, Open Government Ind..., and Betty Idros. The bottom toolbar includes Unmute, Start Video, Participants, Chat, Share Screen, Record, Live Transcript, Reactions, Apps, Whiteboards, and a Leave button.

Zoom Meeting

LIVE YouTube

View

 Betty Idroos	 Athallah Ellandra	 Maharani Wibowo	 Tri Anggraini	 Affianto Purbolaksono
 Andrieta_OGI	 Syarifudin_Bitung	 Open Government Indonesia	 Kiki_OGI	 Andrea_UNA Indonesia
 Purnama Sari	 Adho Rizky Hellegruip	 Humas KPU RI	 Armita	 Muthia
 Rakha	 Ahwan Nasution	 Encep Endan Kuba Raya	 Secretariat of CSO/OGP Indonesia	 Connecting to audio...

Unmute Start Video Participants 20 Chat Share Screen Record Live Transcript Reactions Apps Whiteboards Leave